

Analisis Spasial Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Tiara Oktania, Nefilinda, Afrital Rezki

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Sumatera Barat

nefiinda@yahoo.com

Article History

accepted 02/10/2022

approved 21/10/2022

published 25/11/2022

Abstract

This study aims to determine the Spatial Analysis of Land Conflicts for Palm Oil Plantations in Tapung Hulu District, Kampar Regency. This type of qualitative descriptive research. The results of the research on spatial pattern analysis of oil palm plantation land conflicts. The conflict occurred because the company had used land outside of the HGU that was granted. Does not provide compensation to the public. Factors that cause land conflicts are: economic factors and land ownership. (1) BPN stakes cannot be found in the area under review in accordance with the HGU. (2) The team started to collect location data, based on checking the location, it was found that there were several planting sites by the company, but those that had been planted by the company were located in the HGU. (3) The basis for planting according to the company is compensation for the company's land. Meanwhile, the community has never received land compensation. Based on data obtained from the field, there is still a compensation form that is held by the community. There are 14 villages in Tapung Hulu sub-district, there are 3 villages that have conflicts over community oil palm plantations with private companies. The form is the result of collecting compensation data. The area of community cultivation land that has been collected: 1). Kasikan Village with a conflict area of 2,300 Ha, 2). Senama Grandma Village has a conflict area of 2,800 hectares, 3). The village of Danau Lancang has a conflict area of 1,750 hectares. The results of field checks, the land is outside the HGU area. The Tapung Hulu District Government resolved the conflict between the Company and the Community through negotiation and mediation.

Keywords: spatial analysis, land conflict

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Spasial Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian analisis pola ruang konflik lahan perkebunan kelapa sawit. Konflik terjadi karena perusahaan telah menggunakan lahan di luar dari HGU yang di berikan. Tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik lahan adalah: faktor ekonomi dan kepemilikan lahan. (1) Patok BPN tidak dapat di temukan di dalam areal yang di tinjau sesuai dengan HGU. (2) Tim memulai pendataan lokasi, berdasarkan pengecekan lokasi tersebut ditemukan adanya pada beberapa tempat penanaman oleh pihak perusahaan, namun yang telah di tanam oleh perusahaan lokasi tersebut berada dalam HGU. (3) Dasar penanaman menurut pihak perusahaan adalah ganti rugi lahan perusahaan. Sedangkan masyarakat belum pernah menerima ganti rugi lahan. Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan, masih ada formulir ganti rugi yang di pegang oleh masyarakat. 14 Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu ada 3 Desa yang berkonflik lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan perusahaan swasta. Formulir merupakan hasil pendataan ganti rugi. Luas lahan pengurangan masyarakat yang berhasil di himpun: 1). Desa Kasikan dengan luas lahan konflik 2.300 Ha, 2). Desa Senama Nenek luas konflik 2.800 Ha, 3). Desa Danau Lancang luas konflik 1.750 Ha. Hasil pengecekan lapangan, lahan berada diluar areal HGU. Pemerintah Kecamatan Tapung Hulu menyelesaikan konflik antara Perusahaan dan Masyarakat melalui negosiasi dan mediasi.

Kata kunci: analisis spasial, konflik lahan



PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten dengan jumlah konflik yang paling banyak dan belum terselesaikan. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kampar terdapat 217 kasus pertanahan yang sudah terdaftar atau tercatat di Kantor Pertanahan Kampar. Dari 217 kasus pertanahan yang ada, 167 kasus tergolong sengketa dan konflik pertanahan kemudian 50 kasus tergolong perkara pertanahan yang sudah beracara di pengadilan. Berdasarkan catatan dari Kantor Pertanahan Kampar terdapat 45 kasus pertanahan yang sampai saat ini belum selesai ditangani, 31 kasus tergolong perkara pertanahan dimana kasus ini di tangani di lembaga pengadilan dan 14 kasus lainnya tergolong dalam sengketa dan konflik tanah (Rizki, 2019).

Kecamatan Tapung Hulu merupakan salah satu daerah yang tak terlepas dari adanya konflik lahan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Kecamatan Tapung Hulu merasa lahan yang merupakan hak milik mereka diklaim oleh perusahaan swasta. Kecamatan Tapung Hulu terbentuk pada tahun 1950, akan tetapi jauh sebelum terbentuknya sudah banyak lahan milik warga desa. Aduan terkait masalah sengketa lahan telah diajukan oleh masyarakat ke pihak Kementerian dan mendapatkan surat tebusan dari Dinas Kehutanan terkait pemetaan masalah lahan, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai aduan tersebut. Saat ini, masyarakat mulai merasa terganggu dengan adanya permasalahan yang terus berlanjut. Kecamatan mencoba meredam warga setempat untuk tetap tenang dan menunggu Surat Keputusan KLHK terkait Hak Tanah Masyarakat.

Pada hari selasa tanggal dua puluh enam tahun dua ribu tujuh telah di adakan pengecekan/ peninjauan ke lapangan ke lokasi perusahaan di Kecamatan Tapung Hulu, sesuai dengan surat perintah Bupati Kampar no:141/PEM/VI/2007/115 Tanggal 21 juni 2007 dengan hasil berikut:

1. Patok BPN tidak dapat di temukan di dalam areal yang di tinjau sesuai dengan HGU.
2. Tim memulai pendataan lokasi, berdasarkan pengecekan lokasi tersebut ditemukan adanya pada beberapa tempat penanaman oleh pihak perusahaan, namun yang telah di tanam oleh perusahaan lokasi tersebut di atas berada dalam HGU.
3. Dasar penanaman tersebut menurut pihak perusahaan adalah ganti rugi lahan perusahaan, namun menurut penjelasan dari pihak masyarakat belum pernah menerima ganti rugi lahan tersebut.

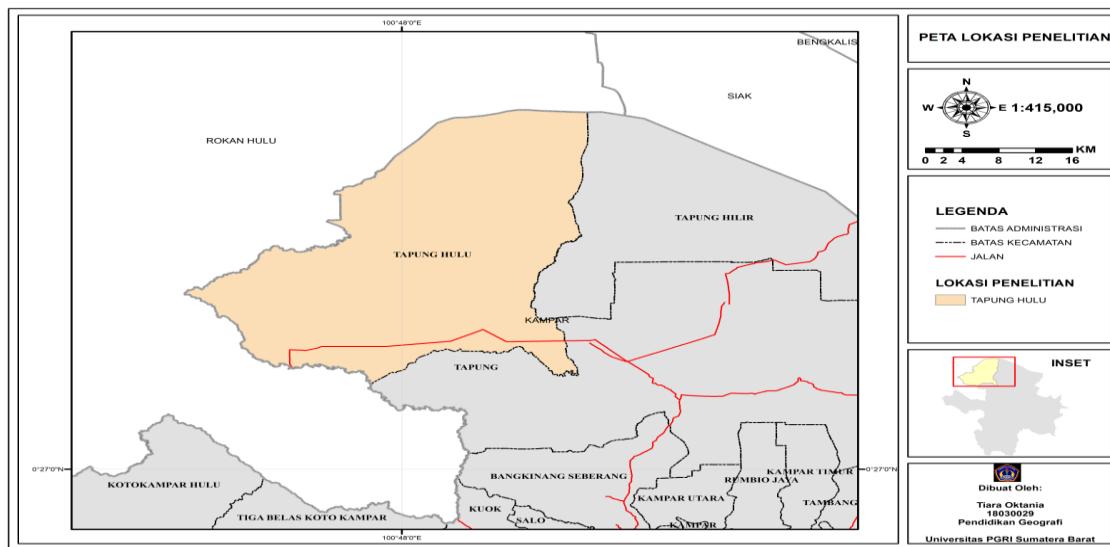
Berdasarkan laporan data yang di kumpulkan lapangan, masih ada formulir ganti rugi yang di pegang oleh masyarakat. 14 Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu ada 3 Desa yang berkonflik lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan perusahaan swasta. Formulir merupakan hasil pendataan ganti rugi, luas lahan pengurangan masyarakat yang berhasil di himpun seluas: 1). Desa Kasikan dengan luas lahan konflik 2.300 Ha, 2). Desa Senama Nenek luas konflik 2.800 Ha, 3). Desa Danau Lancang luas konflik 1.750 Ha. Dari hasil pengecekan lapangan ini yang berada diluar areal HGU.

Pemerintah sudah beberapa kali melakukan mediasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat, namun belum ada hasil keputusannya. Kebijakan yang dibuat pemerintah, lahan di tutup oleh perusahaan tetapi di status quo kan oleh pemerintah daerah. Namun status quo tidak berjalan dengan sebagaimana yang di diharapkan. Status quo hanya berjalan hanya 2 hari dan seterusnya lahan yang berkonflik di kelola oleh perusahaan kembali. Perhatian pemerintah terhadap konflik yaitu setiap kali masyarakat memasukan surat untuk audiensi atau mediasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat pemerintah selalu memberikan peluang terhadap masyarakat. Namun

perusahaan yang tidak memiliki etikat baik, setiap melukan mediasi atau audiensi pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam menyelesaikan konflik lahan. Kalau lahan tersebut kembali ke masyakat untuk di kelola, maka dapat meningkatkan ekonomi masyakat.

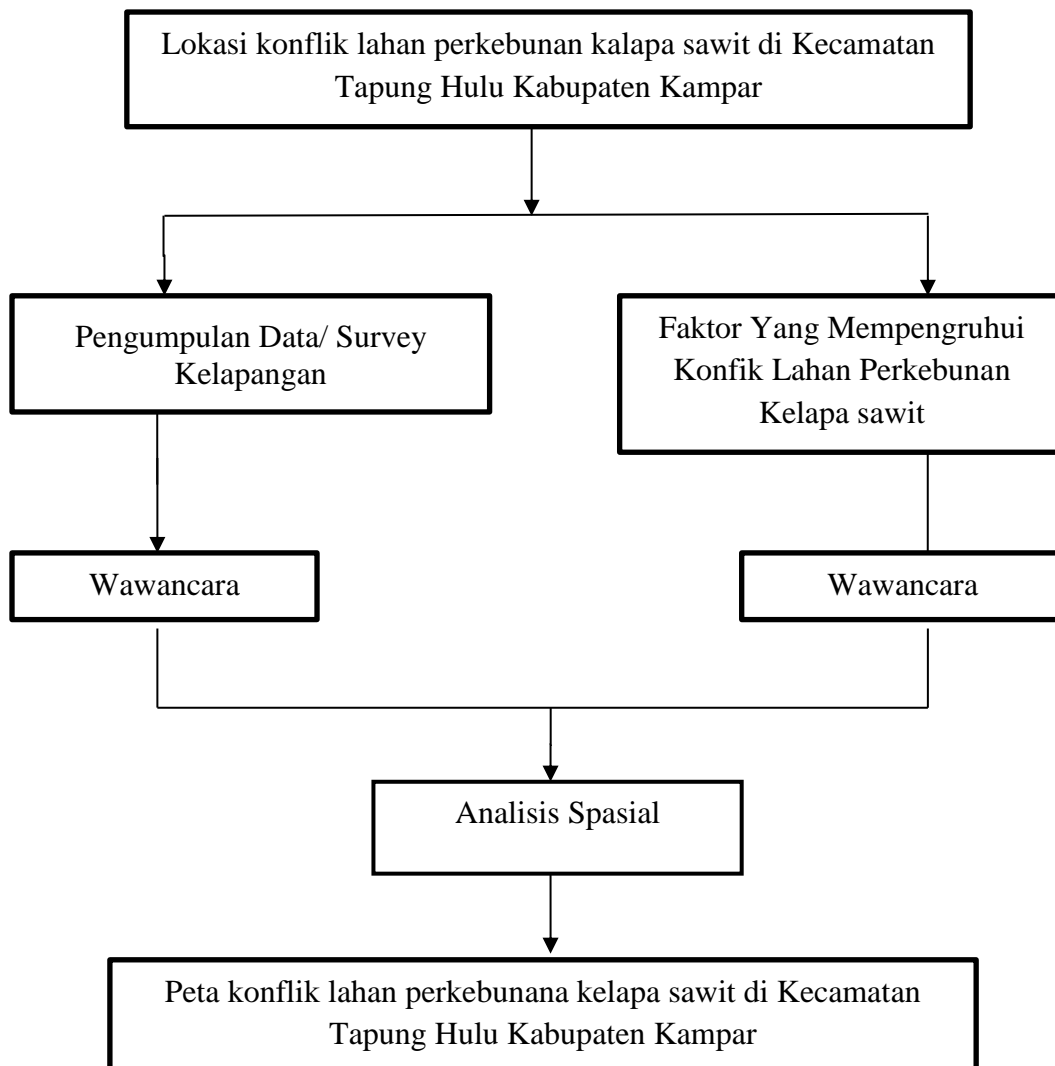
METODE

Metode penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.



Gambar 1: Lokasi Penelitian Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Informan penelitian adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar. Informan kunci adalah (sekretaris camat dan mamak suku) yang mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan konflik lahan perkebunana kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Rumusan permasalahan 1 akan di analisis dengan deskriptif dan rumusan permasalahan ke 2 akan di analisis dengan kualitatif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Diagram alur penelitian:



Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas wilayah Kecamatan Tapung Hulu adalah + 1.169,15 Km² atau 303.789,9 Ha, mempunyai 14 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Senama Nenek. Kecamatan Tapung Hulu merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tapung yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2001. Pada bulan Mei tahun 2022 Kecamatan Tapung Hulu mempunyai penduduk sebanyak 92.397 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 149 jiwa / Km².

1. Pola ruang konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Hasil Wawancara terkait konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dari tahun 1998 sampai hari 2022 belum ada titik terang dalam penyelesaiannya. Penyebab terjadinya konflik adalah HGU sampai saat ini, dari seluruh luasan lahan yang di kelolah oleh perusahaan, ada beberapa Ha yang tidak memiliki HGU, itu yang di tuntutan oleh masyarakat. Pemerintah pernah membuat kebijakan lahan tersebut di tutup dan perusahaan dengan status quo.

Aduan terkait masalah sengketa lahan telah diajukan oleh masyarakat ke pihak Kementerian dan mendapatkan surat tebusan dari Dinas Kehutanan terkait pemetaan masalah lahan, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai aduan tersebut. Saat ini masyarakat mulai merasa terganggu dengan adanya permasalahan yang terus berlanjut. Kecamatan mencoba meredam warga setempat untuk tetap tenang dan menunggu Surat Keputusan KLHK terkait Hak Tanah Masyarakat.

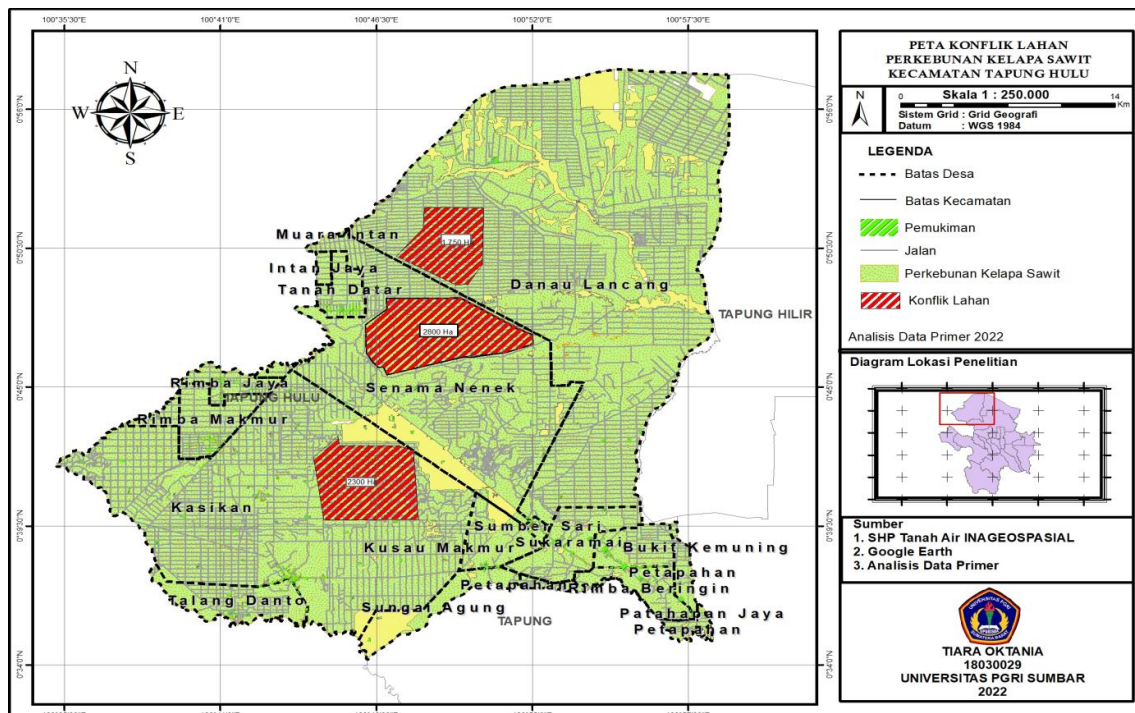
Hasil pengumpulan data diperoleh desa yang memiliki konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 1. Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

No	Desa	Luas (Ha)
1	Kasikan	2.300 Ha
2	Senama Nenek	2.800 Ha
3	Danau Lancang	1.750 Ha
Total		6.850 Ha

Sumber: Kecamatan Tapung Hulu

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdapat 3 Desa yang memiliki konflik lahan perkebunan sawit diantaranya yaitu Desa Kasikan dengan luas lahan konflik seluas 2.300 Ha, Desa Senama Nenek dengan luas lahan konflik seluas 2.800 Ha dan Desa Danau Lancang dengan luas lahan konflik seluas 1.750 Ha. Sehingga total luas keseluruhan lahan yang memiliki konflik adalah seluas 6.850 Ha. Untuk lebih jelas tentang wilayah atau desa yang terjadi konflik lahan perkebunan sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada peta dibawah ini:



Gambar 1. Peta Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Peta persebaran konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu, untuk mengetahui dimana lokasi konflik lahan perkebunan kelapa sawit. Dan hasil

wawancara informan dengan metode snowball sampling untuk mengetahui dengan jumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang lainya kemudian mencari hubungan selanjutnya dengan proses yang sama. Menurut Mustofa & Bakce (2019) Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, hasil overlay peta Pola Ruang Provinsi Riau, potensi konflik lahan terdapat pada Pola ruang Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Lindung/Pariwisata, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Konversi/Hutan Adat, Hutan Produksi Konversi/ Pariwisata, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Dari hasil temuan menunjukkan bahwa potensi konflik lahan yang terbesar didominasi Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap secara berturut-turut sebesar 44,03%, 20,98%, dan 20,95%. Terbatas/Hutan Adat, Hutan Produksi Terbatas/Pariwisata, Hutan Produksi Tetap, Hutan Rakyat, Industri, Kawasan Lindung Kawasan Lindung Resapan Air, Kawasan Peruntukan Lainnya, Lokasi Tambang, Pariwisata, Pemukiman, Perairan, Perkebunan Besar, Perkebunan Rakyat, Pertanian, dan Ruang Terbuka Hijau secara administratif pemerintahan, lokasi perusahaan, terletak pada wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Sumber Makmur/ Desa Danau Lancang
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Sewangi Sejati luhur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasikan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senama Nenek.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

a. Faktor Ekonomi

Jika tuntutan penguasaan lahan di kembalikan ke masyarakat, ini merupakan salah satu keuntungan dan membantu perekonomian masyarakat. Saat ini, perekonomian masyarakat terganggu, karena seringnya dilakukan demo. Seringnya melakukan demo, mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Masyarakat ingin juga mendapatkan ganti rugi lahan yang di garap oleh perusahaan, agar bisa meringankan beban ekonominya. Masyarakat Kecamatan Tapung Hulu, merupakan masyarakat yang tingkat kemiskinan tinggi. Jika lahan di kembalikan kepada masyarakat, maka masyarakat mengelola lahannya untuk Bertani, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Kepemilikan Lahan

Kelebihan luas lahan yang digarap oleh perusahaan, merupakan lahan petani atau lahan masyarakat setempat, ini merupakan pemicu terjadinya konflik, karena masyarakat meyakini kalau itu wilayah mereka, yang di garap oleh perusahaan. Konflik lahan perkebunan kelapa sawit ini juga disebabkan karena hak kepemilikan tanah atau lahan. Terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan swasta, perusahaan yang menggarap lahan milik masyarakat yang di luar dari HGU. Hal tersebut bisa terjadinya konflik karena kurangnya berkas serta bukti-bukti yang dimiliki masyarakat dan perusahaan yang telah melewati kapasitas lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Pemerintah sudah bermusyawarah, sosialisasi dengan perusahaan, untuk menemukan titik terang konflik dengan masyarakat. Masyarakat melakukan unjuk rasa kepada pemerintah, nanti ujungnya demo dan demo, dampaknya cuma untuk menutup wilayah yang berkonflik dan memberhentikan buah untuk di ekspor. Tetapi hal itu tidak pernah berjalan lama. Masyarakat ingin mendapatkan hak miliknya. Kebijakan pemerintah sudah ada, tetapi konflik belum terselesaikan. Konflik disebabkan karena kurangnya berkas serta bukti-bukti yang dimiliki masyarakat dan perusahaan yang telah melewati

kapasitas lahan Hak Guna Usaha (HGU). Suryadi et al. (2021), Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. Konflik lahan perkebunan sawit yang terjadi di Kecamatan Pelalwan Riau disebabkan oleh faktor ekonomi, hal tersebut karena sebagian mata pencaharian masyarakat bergantung kepada perkebunan kelapa sawit. Selain itu berdasarkan segi kepemilikan tanah,

SIMPULAN

1. Pola ruang konflik lahan di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, terdapat 3 Desa yang memiliki konflik lahan perkebunan sawit diantaranya yaitu Desa Kasikan dengan luas lahan konflik seluas 2.300 Ha, Desa Senama Nenek dengan luas lahan konflik seluas 2.800 Ha dan Desa Danau Lancang dengan luas lahan konflik seluas 1.750 Ha. Sehingga total luas keseluruhan lahan yang memiliki konflik adalah seluas 6.850 Ha.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar lain; faktor ekonomi. Lahan yang menjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan karena mempengaruhi ekonomi. Lahan masyarakat yang menjadi konflik merupakan lahan yang dapat dijadikan lahan untuk bertani. Sedangkan dari segi faktor kepemilikan tanah, konflik lahan perkebunan kelapa sawit disebabkan oleh hak kepemilikan lahan, karena kurangnya berkas serta bukti-bukti yang dimiliki masyarakat. Perusahaan yang telah melewati kapasitas lahan Hak Guna Usaha (HGU).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto. (2016). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016 Page 1. *Jom Fisip*, 3(1), 1–10.
- Degradasi, D. A. N., Pada, L., & Perbukitan, K. (2007). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/jg.v4i1.108>
- Elfriani, E., Tarigan, B., Akoeb, E. N., & Hasibuan, S. (2021). *AGRISAINS: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis Analisis Finansial Pembibitan Kelapa Sawit pada Produsen Benih Di Provinsi Sumatera Utara Financial Analysis of Oil Palm Nursery at Seed Producers in North Sumatra Province*. 3(1), 23–30.
- Giovanni, M., Kojo, C., & Lengkong, V. P. . (2015). Pengaruh Konflik Peran, Konflik Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Air Manado. *Jurnal EMBA*, 3(3 September 2015), 90–98.
- Hakim, N., Murtalaxono, K., & Rusdiana, O. (2016). Land use Conflict in Gunung halimun Salak National Park Lebak District. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2007, 128–138.
- Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.215>
- Mustofa, R. (2021). Komparasi Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Rokan Hilir. *Media Bina Ilmiah*, 15(11), 5667–5674.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>
- Nasution, S. H., Hanum, C., & Ginting, J. (2014). Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) Pada Berbagai Perbandingan Media Tanam Solid Decanter dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Sistem Single Stage. *Jurnal Online Agroteknologi*, 2(2), 691–701.
- Papilo, P., & Bantacut, T. (2016). Klaster Industri Berbasis Kelapa Sawit. *Industry*

Journals, 87–96.

- Putra, A. D., Sayamar, E., & Kausar. (2004). the Conflict and the Conflict Resolution of Plantations (a Study on Plantations Conflict Between Pt Perkebunan Nusantara V Sei Kencana and the Rural Community of Senama Nenek Village Subdistrict of Tapung Kampar District). *Jom Faperta*, 1(2), 1–4.
- Rezki, S.Pd., M.Si, A., Juita, E., Dasrizal, D., & Putra Ulmi, A. Z. (2019). Analisis Spasial Pola Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian (Studi Kasus Nagari Cubadak). *Jurnal Spasial*, 4(2), 62–68. <https://doi.org/10.22202/js.v4i2.3089>
- Rizki, M. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jom Fisip*, 6(Januari-Juli), 1–13.
- Rizkiawati, R., & Humaedi, S. (2019). Konflik Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikeris Di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20894>
- Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A., & Barus, B. (2021). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 167–178. <https://doi.org/10.22500/8202031914>
- Syahputra, E., Sarbino, & Dian, S. (2011). Weeds Assessment di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut. *Perkebunan Dan Lahan Tropika*, 1, 37–42.
- Widiastuti, F. (2017). Lahan Sawah Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan serta Strategi Pencapaian Kemandirian Pangan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(3), 17–30. <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i3.6479>